

PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP VALUE FOR MONEY

Indah Sari Rahmawati
indahsrr23@gmail.com
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Management and Accountability of Regional Finances as stipulated in Government Regulation No. 105/2000, emphasizes that supervision in managing regional finances must be orderly and obedient based on the prevailing laws and regulations. This research is a qualitative descriptive study, with the aim to analyze the performance of local governments in managing the Sidoarjo Regency Regional Revenue Budget (APBD) in 2014 to 2018 based on the concept of value for money. Based on the results of data retrieval and analysis using value for money that has been done, the Sidoarjo regency government in the period 2014 - 2018 recorded an unstable economic ratio but still economical with a ratio of less than 100%, a good level of efficiency with figures not reaching 100%, and effectiveness reaches more than 100%. This can be seen in the achievements of programs that have been implemented, Elementary School Education Programs, Public Health Efforts Programs, and other activities that are able to reach targets in the community.

Keywords: regional revenue expenditure budget, value for money, economical, efficiency, effectiveness

ABSTRAK

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, menegaskan bawasannya dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah harus bersifat tertib dan taat berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 hingga 2018 berdasarkan konsep *value for money*. Berdasarkan hasil pengambilan data dan analisa dengan menggunakan *value for money* yang telah dilakukan, pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 2014 - 2018 tercatat memiliki Rasio Okonomis yang tidak stabil namun tetap ekonomis dengan rasio kurang dari 100%, tingkat efisiensi yang baik dengan angka tidak mencapai 100%, dan efektivitas mencapai lebih dari 100%. Hal tersebut terlihat dalam capaian program yang telah dilaksanakan, Program Pendidikan Sekolah Dasar, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dan kegiatan lainnya yang mampu mencapai target di masyarakat.

Kata Kunci: anggaran pendapatan belanja daerah, value for money, ekonomis, efisiesi, efektivitas.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan penetapan peraturan oleh pemerintah, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan pemerintahan, meliputi berbagai kegiatan pengelolaan yang mencakup kegiatan pengendalian dan evaluasi, serta perencanaan pelaksanaan dan kegiatan pengawasan. Hal tersebut tentunya mencakup berbagai hal yang tidak terkecuali adalah penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan disesuaikan atau dikelola sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari daerah tersebut. Dalam perannya, pemerintah daerah dalam menanggapi hak otonomi yang diberikan, tentunya mampu memperluas jalan agar mampu melakukan manajerial keuangan daerah berdasarkan pada kepingatan publik.

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, menegaskan bawasannya dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah harus bersifat tertib dan taat berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Selain hal tersebut, dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan

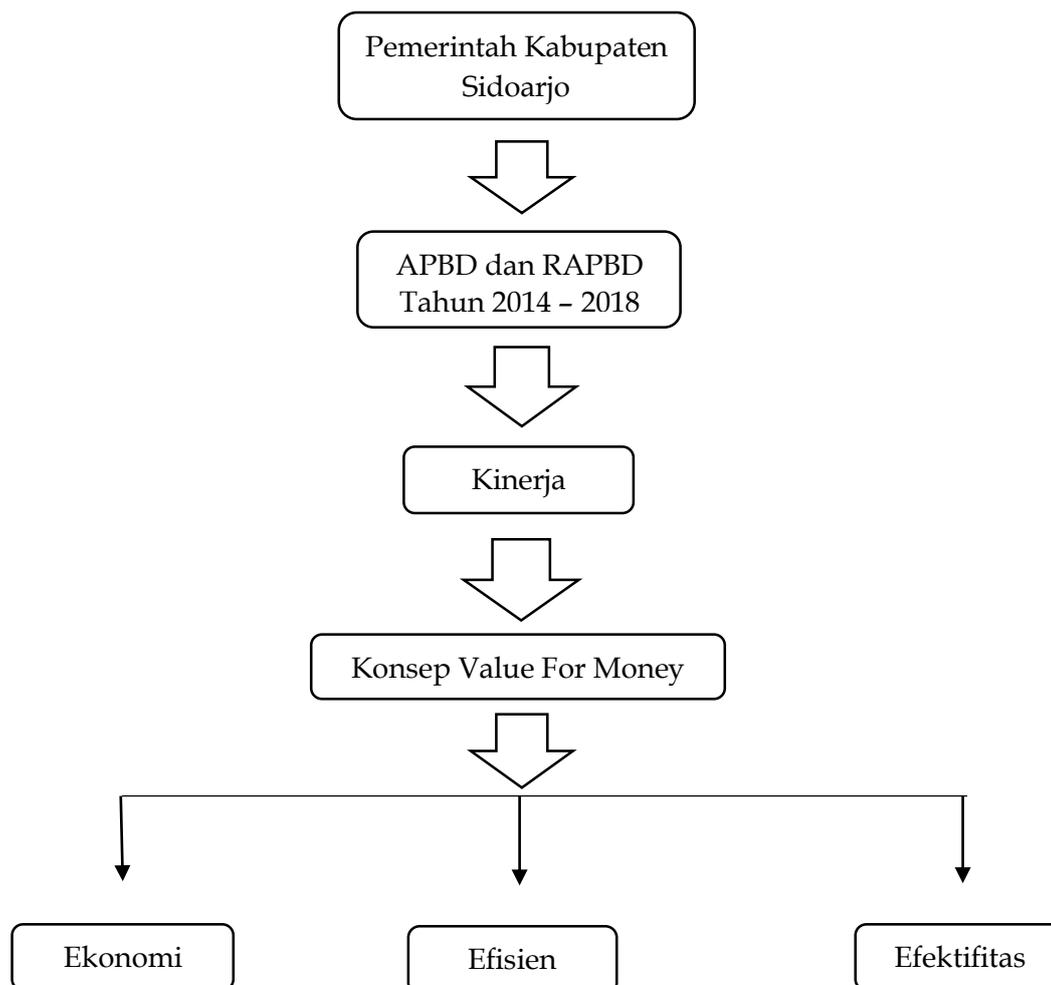
daerah juga harus efisien dan efektif, transparan serta bertanggung jawab dan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Dimana hal tersebut akan mampu menjadi cerminan akan kemampuan suatu daerah dalam melakukan pembiayaan operasional tugas pemerintahan, pembangunan daerah serta pelayanan masyarakat.

Suatu daerah yang mampu menjalankan otonomi daerah dengan baik memiliki beberapa indikator yang disampaikan oleh Halim (2001:125). Hal tersebut mencakup kemampuan keuangan daerah, dan persentase penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengukuran kinerja instansi pemerintah adalah alat dalam manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan suatu keputusan, serta akuntabilitas yang digunakan untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Sehingga dengan hasil dari pengukuran tersebut mampu menunjukkan tingkat terwujudnya visi dan misi pemerintahan yang sedang berlaku.

Semakin lama instansi pemerintah kian pesat perkembangannya, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Tetapi hal tersebut mengakibatkan timbulnya fenomena semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik dan adanya transparansi dari pemerintah. Sehingga pemerintah daerah dirasa perlu memerhatikan kinerja pengelolaan keuangan daerah agar dalam pelaksanaannya mampu berjalan secara efektif dan efisien serta ekonomis dan memenuhi prinsip *value for money* (VFM) dimana mendukung pula adanya akuntabilitas, keadilan dan transparansi yang mendorong pertumbuhan ekonomi mandiri bagi daerah tersebut. Apabila suatu daerah memiliki kemampuan keuangan untuk melakukan pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah tersebut dapat dikatakan memiliki kinerja keuangan yang baik.

Penerapan *value for money* (VFM) menurut Mardiasmo (2000) merupakan hal yang penting bagi pemerintah dalam perannya sebagai pelayan masyarakat. Dimana indikator yang ada dalam *value for money* (VFM) akan dapat digunakan untuk menilai hal hal terkait: 1) alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan publik; 2) mutu pelayanan publik; 3) efektivitas pelayanan publik; dan 4) peningkatan *public cost awareness*. Keempat hal tersebut akan bertugas sebagai akar pendukung pelaksanaan pertanggung jawaban dalam upaya pengelolaan dana masyarakat dengan dasar konsep *value for money* (VFM). Berdasarkan hal tersebut, diperlukan sistem yang mampu mengelola keuangan serta anggaran daerah yang memiliki orientasi pada kinerja, dimana anggaran kinerja berperan sebagai pendukung adanya akuntabilitas publik dari pemerintahan daerah yang mewujudkan desentralisasi beserta otonomi.

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui tingkat kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo mulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018. Alat analisa yang digunakan sebagai alat asah merupakan *value for money* (VFM) yang terdiri dari keseluruhan elemen, dimana elemen tersebut terdiri dari ekonomi, efisiensi dan efektivitas seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Selain untuk mengetahui hal tersebut, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan atau pemahaman terhadap kinerja pemerintahan dan konsep dari *value for money* (VFM) itu sendiri. Berikut merupakan rerangka berfikir yang digunakan:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran Penelitian

TINJAUAN TEORITIS

Organisasi Sektor Publik

Menurut Bastian (2006:30) organisasi sektor publik adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat, seperti organisasi pemerintah pusat, daerah, parpol, dan LSM, yayasan, pendidikan dan kesehatan serta organisasi tempat ibadah. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:25) istilah sektor publik dari sudut pandang ilmu ekonomi artinya suatu entitas yang aktifitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dalam pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Karakteristik organisasi sektor publik menurut Bastian (2010:11), memiliki tujuh poin yang terdiri dari tujuan, aktivitas, sumber pembiayaan, pola pertanggung jawaban, kultur organisasi, penyusunan anggaran dan *stakeholder*. Berdasarkan Bastian (2010:11), organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang terdiri dari tujuh poin, dimana poin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan : agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan yang mendasar, serta kebutuhan tambahan lainnya baik jasmani maupun rohani.
2. Aktivitas : pelayanan publik (Public service) yang diterapkan dalam berbagai bidang seperti bidang kesehatan, keamanan, pendidikan, penegak hukum, penyediaan pangan dan transportasi publik.

3. Sumber Pembiayaan : berasal dari hal hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, sebagai contoh adalah pajak dan retribusi yang merupakan perwujudan dari dana masyarakat, dan juga laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah.
4. Pola pertanggungjawaban : bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat, layaknya dalam organisasi pemerintahan yang terdiri dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta dalam yayasan dan LSM seperti dewan pengampu.
5. Kultur Organisasi : bersifat formal serta birokratis, dan berjenjang.
6. Penyusunan Anggaran : tentunya didalam perencanaan atau penyusunan anggaran, perlu melibatkan peran masyarakat secara langsung dengan cara mempublikasikan anggaran program publik dengan tujuan agar mampu dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Apabila pada kedua pihak telah mencapai persetujuan, anggaran yang telah disusun kemudian disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, DPRD, majelis syuro partai, dewan pengurus LSM, atau dewan pengurus yayasan.
7. Stakeholder : terdiri dari seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu terdiri juga dari para pegawai organisasi, para investor, para kreditor, lembaga-lembaga internasional termasuk lembaga Donor Internasional (seperti Bank Dunia (World Bank), Asian Development Bank (ADB), Internasional Monetary Fund (IMF), United Nation Development Program (UNDP), USAID, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan pemerintah luar negeri.

Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja (performance measurement) menurut (Robertson, 2002) dalam Mahsun (2011:25) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan ; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Sedangkan pengukuran kinerja menurut Mahmudi (2007:12) pengukuran kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat kesuksesan organisasi. Didalam konteks organisasi sektor publik, tingkat kesuksesan suatu organisasi mampu digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Tentunya penilaian tentang kesuksesan organisasi terkait dengan pemberian pelayanan public yang berkualitas, didapatkan dari masyarakat yang berperan sebagai subjek pelayanan.

Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP, dasar yang digunakan untuk menilai keberhasilan serta kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan sasaran dan tujuan dari perwujudan visi dan misi dari instansi pemerintah, merupakan tujuan dari penggunaan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dijalankan pada tingkatan input dan output, serta benefit dan impact atau dampak yang nantinya akan ditimbulkan, dan tentunya diukur secara sistematis. Berdasarkan hal tersebut, pengukuran kinerja mampu menjadi dasar yang rasional dalam perannya melakukan pengambilan keputusan dan pengukuran terhadap kinerja yang telah berjalan dalam rentan waktu tertentu, serta melakukan perbandingan terhadap rentan waktu lainnya.

Berdasarkan asas *money follows function* yang digunakan dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, dimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, juga mencakup tentang penyerahan sumber sumber dari pembiayaan yang pada saat sebelumnya masih berada dalam kuasa pemerintah pusat. Berdasarkan hal tersebut, tercipta adanya hak dan kewajiban yang mampu dinilai menggunakan keuangan. Sehingga dalam pelaksanaannya, pembukuan keuangan daerah haruslah jelas dan transparan dalam sebuah sistem yang mampu mengelola keuangan daerah

dengan baik. Indikasi yang menjadi keberhasilan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya adalah dengan meningkatkan peran dan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan persentase beban masyarakat dan investor seminimal mungkin (Saragih, 2003:133).

Menurut Bastian (2006: 275), terdapat beberapa manfaat dalam melakukan pengukuran kinerja oleh organisasi sektor publik baik secara internal maupun eksternal, hal tersebut mencakup peningkatan dan pengembangan terhadap kesepakatan kinerja dan membantu disaat akan melakukan evaluasi kinerja. Sedangkan siklus pengukuran kinerja Menurut Mardiasmo (2002), terdapat lima tahap untuk melakukan pengukuran kinerja, hal tersebut terdiri dari perencanaan strategi, penciptaan indikator kinerja, pengembangan sistem, penyempurnaan ukuran, dan integrasi manajemen.

Indikator Kinerja

Menurut Bastian (2010:157), indikator kerja merupakan suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif dimana menggambarkan dari nilai pencapaian dari tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Indikator kerja tersebut terdiri dari *inputs*, *outputs*, *benefits*, *outcomes*, dan *impacts*. Dimana indikator tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.
- b. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau nonfisik.
- c. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
- d. Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- e. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Value For Money (VFM)

Value for money (VFM) berpusat pada tiga elemen dasar yang terdiri dari efisiensi, efektivitas dan ekonomi yang merupakan konsep dari pengelolaan organisasi sektor publik, dimana dalam perannya untuk memenuhi tercapainya penggunaan biaya *input* minimum dan capaian *output* yang maksimal (Mardiasmo, 2009:10).

Konsep *Value For Money* terdiri atas tiga elemen utama, yaitu:

a. Ekonomi

Menurut Mahmudi (2010:82-83), ekonomi memiliki kaitan dengan kegiatan pengelolaan *input* primer yang berupa sumber daya keuangan atau uang dan kas, kemudian dikelola menjadi *input* sekunder menjadi berbagai hal operasional seperti barang dan modal, bahan dan infrastruktur, serta tenaga kerja. Secara konseptual, ekonomi terkait dengan konsep biaya dalam mendapatkan masukan atau *input* yang direncanakan, dimana *input* diharapkan dapat diperoleh dengan yang mendekati harga pasar, dan pastinya dengan harga yang lebih rendah (*spending less*). Berdasarkan perhitungan sistematis, ekonomi membandingkan diantara *input* terhadap nilai rupiah dalam mendapatkan *input* tersebut. Pengukuran Ekonomi dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Tingkat Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

b. Efisiensi

Efisiensi menurut Mahmudi (2010:85) memiliki keterkaitan dengan *output* yang berupa pelayanan atau barang, dimana pelayanan atau barang tersebut merupakan hasil dari sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Secara konseptual, efisiensi membandingkan diantara *output* dengan *input* yang sering disebut dengan istilah lain *output* per unit *input*. Dalam pelaksanaannya, suatu program kegiatan atau organisasi mampu mencapai kata efisien jika mampu mencapai tingkatan *output* tertentu dengan tingkatan *input* yang minimal. Atau mampu menghasilkan *output* yang besar (*spending well*) dengan menggunakan nilai *input* seminimal mungkin. Pengukuran Efisiensi dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

c. Efektivitas

Sedangkan efektivitas menurut Mahmudi (2010:86) memiliki kaitan dengan hasil yang didapatkan dengan hasil yang diharapkan untuk tercapai. Efektivitas erat kaitannya dengan *output* dengan tujuan dari suatu program atau kegiatan. Efektivitas selal terkait dengan nilai *output* yang mempengaruhi pencapaian tujuan, dimana nilai *output* yang tinggi akan meningkatkan efektivitas organisasi atau kegiatan tersebut. Kegiatan ekonomi akan berfokus pada nilai dari *input* dan efisiensi terhadap *output*, sedangkan efektivitas berfokus pada hasil atau *outcome*, dimana apabila suatu program mampu mencapai efektivitas dikarenakan nilai *output* yang dihasilkan mampu memenuhi harapan, hal tersebut dikatakan sebagai *spending wisely*. Pengukuran Efektifitas dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Menurut Mardiasmo (2009:130) indikator value for money dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi)

Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Efisiensi artinya output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (seperti staf, upah, dan biaya administrasi) dan keluaran yang dihasilkan.

b. Indikator kualitas pelayanan (efektifitas)

Efektifitas artinya kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (*spending wisely*). Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif, dimana deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berusaha mendefinisikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi ataupun mengambil masalah-masalah atau memutuskan perhatian kepada masalah-masalah yang aktual sebagaimana adanya saat penelitian yang berlangsung

dilaksanakan. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif karena hasil dari penelitian ini berupa data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (moleong, 2010:4). Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah unit kerja pemerintah yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder sendiri menurut Indriantoro dan Supomo (2002:147) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, yaitu dengan observasi langsung dan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Teknik Analisis Data

Didalam penelitian ini, peneliti melakukan perbandingan data yang didapatkan dengan teori-teori terkait dengan tujuan untuk dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti dengan melakukan penarikan kesimpulan dari konsep dan teori yang telah dipelajari sebelumnya. Peneliti menggunakan jenis analisis data yang melakukan pengolahan dan kata-kata untuk mengemukakan uraian dan penjelasan, dimana jenis analisis data tersebut disebut sebagai teknik analisis deskriptif kualitatif.

Data yang didapatkan dari kegiatan pengumpulan data dengan menggunakan berbagai metode meliputi dokumentasi dan wawancara tidak terstruktur, diolah dan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori dalam proses studi pustaka. Selanjutnya, data yang telah diproses tersebut melalui proses terakhir yaitu penyusunan kesimpulan dan saran dimana dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya atau instansi yang bersangkutan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di utara, Selat Madura di timur, Kabupaten Pasuruan di selatan, serta Kabupaten Mojokerto di barat. Bersama dengan Gresik, Sidoarjo merupakan salah satu penyangga utama Kota Surabaya, dan termasuk dalam kawasan Gerbang kertosusila. Dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Sidoarjo adapun misi pembangunan Kabupaten Sidoarjo, yaitu: 1) Pemerintah yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintah yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan, 2) Meningkatkan kemandirian dan perekonomian daerah melalui optimalisasi basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat, 3) Meningkatkan kualitas dan standar pelayanan pendidikan dan kesehatan, 4) Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban, 5) Infrastruktur publik yang memadai & berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo menganut sistem desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi dalam mengatur dan mengurus daerah otonominya. Pemerintahan Kota Surabaya dipimpin oleh seorang bupati dan wakil bupati yang membawahi koordinasi atas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terdiri dari sekretariat daerah kota; staf-staf ahli, sekretariat DPRD kota, dinas-dinas, badan-badan, inspektorat daerah, kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat (termasuk satuan yang setingkat), dan kelurahan yang dikepalai oleh seorang lurah (termasuk satuan yang setingkat).

Seorang bupati sebagai Kepala Daerah harus memegang teguh dan dapat mengamalkan Pancasila, menjalankan peraturan yang berlaku sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tugas dan Wewenang Walikota dalam menyelenggarakan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD untuk mengajukan rancangan dan menetapkan Perda tentang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) agar dapat memenuhi kewajiban daerah. Bupati juga harus melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara pelayanan publik ialah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun untuk kegiatan pelayanan publik. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada warga negara dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

Dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Sidoarjo adapun misi pembangunan Kabupaten Sidoarjo, yaitu: 1) Pemerintah yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintah yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan, 2) Meningkatnya kemandirian dan perekonomian daerah melalui optimalisasi basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat, 3) Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan pendidikan dan kesehatan, 4) Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban, 5) Infrastruktur publik yang memadai & berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan kebijakan keuangan pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah yang disusun pemerintah daerah bersama DPRD. APBD dapat membantu dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan pemerintah daerah. Pada setiap tahunnya jumlah penduduk yang semakin bertambah, pemerintah harusnya lebih baik dalam menyusun dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengukuran kinerja keuangan dilakukan untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah baik atau tidak baik. Dalam mengukur kinerja pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014 - 2018. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada tabel 1, sedangkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 - 2018 pada tabel 2.

Tabel 1
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
A	PENDAPATAN	3.128.535.332.717	3.561.941.283.596	3.389.966.737.239	4.029.066.902.057	4.124.471.103.455
1	Pendapatan Asli Daerah	1.003.045.392.951	1.180.576.448.721	1.203.799.005	1.557.772.194.420	1.493.647.141.178
2	Pendapatan Transfer Lain-lain	2.076.966.962.766	2.257.346.844.848	2.124.107.271.734	2.456.316.661.136	2.647.146.016.000
3	Pendapatan yang Sah	48.522.977.000	124.017.990.000	62.060.026.500	14.987.046.500	163.677.946.277
B	BELANJA	3.577.576.573.478	4.221.534.146.573	3.957.737.172.284	4.613.059.104.900	5.005.097.845.031
1	Belanja Operasi	2.463.470.931.853	2.733.114.259.072	2.573.291.225.091	3.116.144.320.761	3.373.349.240.144
2	Belanja Modal	952.903.497.819	1.166.668.718.514	935.848.732.339	901.017.123.815	1.101.306.440.483
3	Belanja Tak Terduga	3.453.042.000	3.000.000.000	12.160.365.000	4.018.430.658	6.043.425.847
4	Transfer	157.749.101.805	318.751.168.985	436.436.849.854	591.789.229.666	524.398.738.556
C	PEMBIAYAAN	449.041.240.761	659.592.863.004	567.770.435.045	583.992.201.843	880.626.741.575
1	Penerimaan Daerah	496.191.240.761	727.492.863.044	587.141.435.045	596.892.202.843	895.950.741.575
2	Pengeluaran Daerah	47.150.000.000	67.900.000.000	19.731.043.045	12.900.000.000	15.342.000.000
3	SiLPA	-	-	-	-	-

Sumber: bpkad.sidoarjokab.go.id, 2019

Tabel 2
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
A	PENDAPATAN	3.273.379.955.995	3.556.219.038.762	3.668.041.957.746	4.045.685.362.112	4.332.577.984.768
1	Pendapatan Asli Daerah	1.115.332.938.500	1.266.786.627.409	1.335.283.958.792	1.617.806.819.696	1.685.558.666.147
2	Pendapatan Transfer Lain-lain	2.103.999.540.495	2.189.366.161.353	2.270.873.272.454	2.396.023.195.916	2.486.757.952.121
3	Pendapatan yang Sah	54.047.477.000	100.066.250.000	61.884.726.500	14.855.346.500	160.261.366.500
B	BELANJA	3.006.567.451.395	3.662.799.265.944	3.651.619.251.558	3.748.313.122.059	4.188.537.810.911
1	Belanja Operasi	2.160.461.877.187	2.412.924.547.652	2.049.470.834.602	2.065.737.934.081	2.866.852.815.459
2	Belanja Modal	691.163.487.699	396.192.614.541	809.997.501.058	565.233.558.275	810.565.148.332
3	Belanja Tak Terduga	1.793.770.944	98.518.104	2.853.921.413	872.826.534	-
4	Transfer	153.148.315.564	313.583.585.646	429.296.994.484	576.468.803.168	511.119.847.119
C	PEMBIAYAAN	447.780.358.404	680.821.662.228	567.569.496.655	585.678.501.522	884.177.835.763

1	Penerimaan Daerah	492.543.358.404	724.018.662.228	582.812.496.655	592.668.501.522	890.462.835.763
2	Pengeluaran Daerah	44.763.000.000	43.197.000.000	15.243.000.000	7.010.000.000	6.285.000.000
3	SiLPA	714.592.863.004	574.241.435.045	583.992.202.843	883.050.741.575	1.028.218.009.620

Sumber: bpkad.sidoarjo.jakab.go.id, 2019

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari segi Ekonomis

Mahmudi (2010: 82-83) menjelaskan bahwa, ekonomi terkait dengan pengkonversian input primer berupa sumber daya keuangan (uang/kas) menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Secara sistematis ekonomi merupakan perbandingan antara input dengan nilai rupiah untuk memperoleh input tersebut.

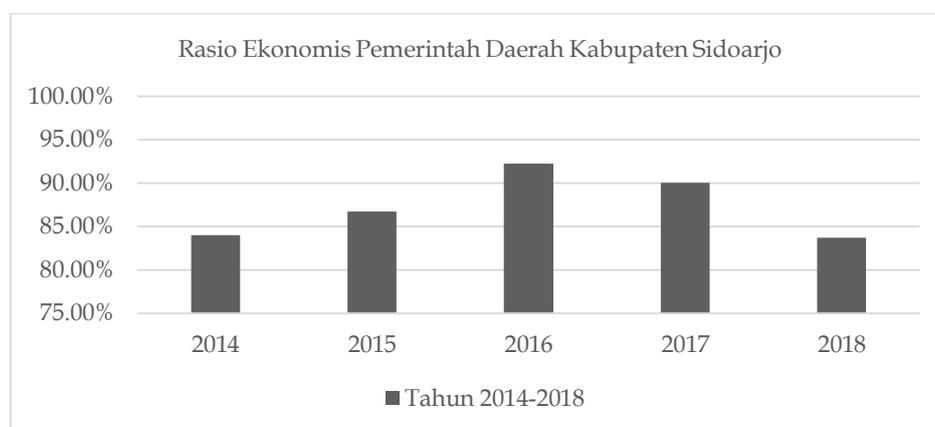
Hasil data yang terdapat pada tabel dibawah ini diambil dari tabel 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 - 2018 atas data anggaran pengeluaran dan tabel 2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo atas realisasi pengeluaran untuk periode tahun 2014 - 2018 yang telah disimpulkan oleh peneliti, yaitu:

Hasil data yang terdapat pada tabel dibawah ini diambil dari tabel 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 - 2018 atas data anggaran pengeluaran dan tabel 2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo atas realisasi pengeluaran untuk periode tahun 2014 - 2018 yang telah disimpulkan oleh peneliti, yaitu:

Tabel 3
Perhitungan Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Realisasi Pengeluaran	Anggaran Pengeluaran	Rasio Ekonomis	Keterangan
2014	3.006.567.451.395,01	3.577.576.573.478,34	84,03%	Ekonomis
2015	3.662.799.265.944,61	4.221.534.146.573,21	86,76%	Ekonomis
2016	3.651.619.251.558,26	3.957.737.172.284,80	92,26%	Ekonomis
2017	3.748.313.122.059,10	4.613.059.104.900,67	90,03%	Ekonomis
2018	4.188.537.810.911,10	5.005.097.845.031,35	83,68%	Ekonomis

Sumber: Data Penelitian yang diolah, 2019



Sumber: Data Penelitian yang diolah, 2019

Gambar 2
Perkembangan Tingkat Ekonomis Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 - 2018

Berdasarkan data yang telah dikelola oleh peneliti grafik dan Tabel diatas menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola APBD tahun 2014-2018. Pengelolaan APBD yang ekonomis berada pada tahun 2014 - 2018 karena jumlah persentase yang mencapai <100%. Pada tahun 2014 yang awalnya persentase ekonomisnya 84,03% meningkat menjadi 86,76% pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 pengelolaan APBD Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu 92,26%. Tetapi pada tahun 2017 pengelolaan APBD Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan sebesar 2,23% yang mana tingkat ekonomisnya menjadi 90,03%. Artinya kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD Kabupaten Sidoarjo menurun pada tahun 2016 dan 2017. Lalu pada tahun 2018 pengelolaan APBD Kabupaten Sidoarjo kembali meningkat yang sebelumnya pada tahun 2017 sebesar 90,03% menjadi 83,68% pada tahun 2018. Meskipun terjadi peningkatan dan penurunan, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tetap dapat dikatakan ekonomis karena jumlah persentasenya yang kurang dari 100%.

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari segi Efisiensi

Efisiensi merupakan gambaran untuk membandingkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan semakin baik.

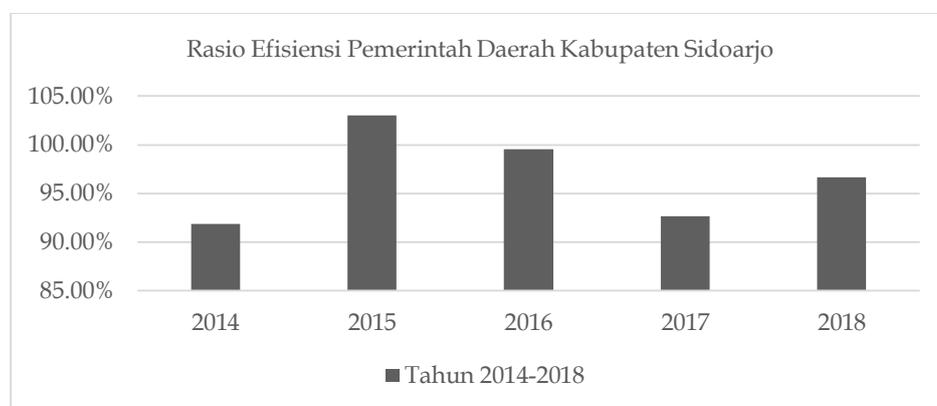
Hasil perhitungan dalam menghitung tingkat efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dalam tabel berikut ini, yaitu:

Tabel 4
Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Realisasi Pengeluaran	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi	Keterangan
2014	3.006.567.451.395,01	3.273.379.955.995,16	91,84%	Efisien
2015	3.662.799.265.944,61	3.556.219.038.762,24	102,99%	Tidak Efisien
2016	3.651.619.251.558,26	3.668.041.957.746,70	99,55%	Efisien
2017	3.748.313.122.059,10	4.045.685.362.112,53	92,64%	Efisien
2018	4.188.537.810.911,10	4.332.577.984.768,01	96,67%	Efisien

Sumber: Data Penelitian yang diolah, 2019

Hasil data yang terdapat pada Tabel diatas diambil dari tabel 2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 - 2018 yang telah disimpulkan oleh peneliti. Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan perkembangan tingkat efisiensi pendapatan Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2014 - 2018:



Sumber: Data Penelitian yang diolah, 2019

Gambar 3
Perkembangan Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 - 2018

Berdasarkan data yang telah dikelola oleh peneliti, dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014 tingkat persentase sebesar 91,84% yang berarti telah efisien. Pada tahun 2015 tingkat persentase bertambah sebesar 11,15% menjadi 102,99% yang artinya kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo menurun menjadi tidak efisien, hal ini dikarenakan realisasi pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan. Kemudian pada tahun 2016 tingkat persentase efisiensi keuangan daerah menurun 3,44% sehingga persentase menjadi 99,55% yang dimana kinerja pemerintah kembali efisien. Tahun 2017 tingkat persentase menurun kembali sebesar 6,91% sehingga menjadi sebesar 92,64%. Pada tahun 2018 tingkat persentase mengalami kenaikan sebesar 4,03% sehingga menjadi 96,67%. Terlihat pada tahun 2016 - 2017 pemerintah berusaha meningkatkan kembali efisiensi dari pengelolaan APBD Kabupaten Sidoarjo. Meskipun tingkat keuangan daerah tidak stabil yang mana terlihat pada tahun 2015 tidak efisien tetapi hal tersebut tetap menunjukkan bahwa keuangan Pemerintah Daerah Sidoarjo efisien karena program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo telah terealisasi dengan baik. Sebagai contoh, pada tahun 2018 tingkat efisiensi pengelolaan APBD Kabupaten Sidoarjo mencapai 96,67% dan dapat dikatakan efisien, hal ini tidak lepas dari program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang telah terealisasi dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari segi Efektivitas

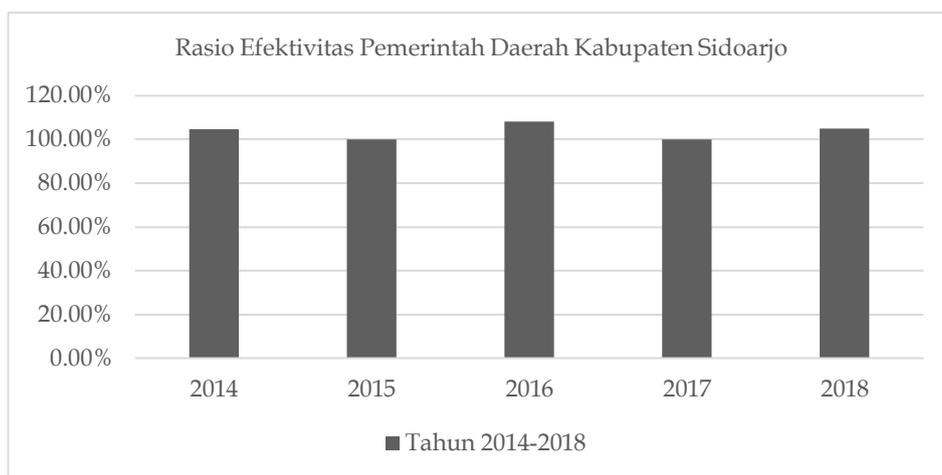
Menurut Halim (2011) Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Efektivitas memiliki kaitan dengan hasil yang di harapkan dengan hasil yang telah dicapai. Hasil data yang terdapat pada tabel dibawah ini diambil dari tabel 1 atas data anggaran pendapatan dan tabel 2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 - 2018 yang telah disimpulkan oleh peneliti, yaitu:

Tabel 5
Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Rasio Efektivitas	Keterangan
2014	3.128.535.332.717,00	3.273.379.955.995,16	104,63%	Efektif
2015	3.561.941.283.596,00	3.556.219.038.762,24	100%%	Efektif Seimbang
2016	3.389.966.737.239,00	3.668.041.957.746,70	108,20%	Efektif
2017	4.029.066.902.057,03	4.045.685.362.112,53	100%	Efektif Seimbang
2018	4.124.471.103.455,83	4.332.577.984.768,01	105%	Efektif

Sumber: Data Penelitian yang diolah, 2019

Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan perkembangan tingkat efektivitas pendapatan Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2014 - 2018:



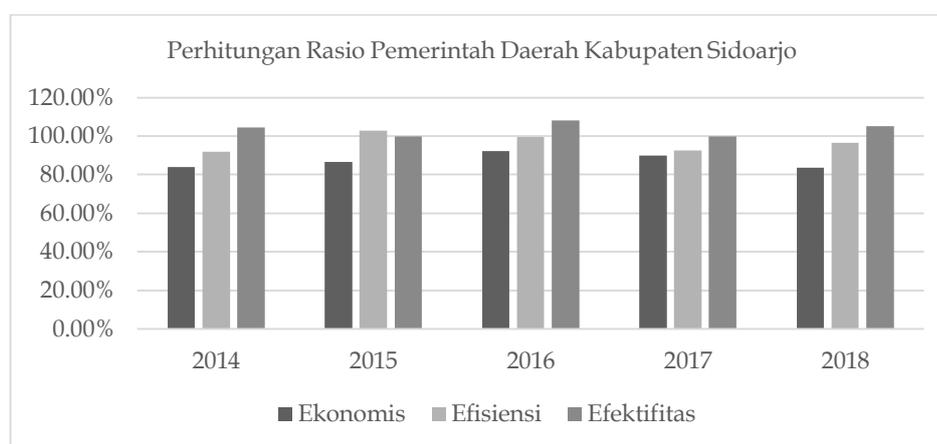
Sumber: Data Penelitian yang diolah, 2019

Gambar 4
Perkembangan Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 – 2018

Berdasarkan data yang telah dikelola oleh peneliti grafik tersebut menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola APBD tahun 2014 – 2018. Pengelolaan APBD pada tahun 2014 – 2018 cenderung tidak stabil. Pada tahun 2014 tingkat presentase sebesar 104,63%. Pada tahun 2015 tingkat presentase mengalami penurunan sebesar 4,63% menjadi 100% yang menyebabkan menjadi efektif seimbang. Sedangkan pada presentase pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 8,2% menjadi 108,20% yang menyebabkan kembali efektif. Namun pada tahun 2017 tingkat presentase kembali turun sebesar 8,2% menjadi 100% sehingga tingkat pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo efektif seimbang. Kemudian pada tahun 2018 tingkat pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan sebesar 5% menjadi 105% yang menjadikan pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo efektif. Dapat dilihat pula dari data yang telah diolah tersebut bahwa tingkat efektif paling tinggi terjadi pada tahun 2016.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan



Sumber: Data Penelitian yang diolah, 2019

Gambar 5
Grafik Perkembangan Rasio Kinerja *Value For Money* Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 – 2018

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep value for money yang berdasarkan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam menilai kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan sampel Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan data Laporan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Daerah (APBD) dan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Daerah (RAPBD) Kabupaten Sidoarjo periode 5 tahun yaitu pada tahun 2014 – 2018. Perkembangan rasio kinerja value for money yang terdiri dari rasio ekonomis, rasio efisiensi, serta efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014 – 2018 disajikan dalam grafik berikut ini:

Grafik diatas merupakan hasil pengolahan yang didapatkan dari pengolahan data penelitian. Laporan dari anggaran yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dapat diperlihatkan sebagai diagram batang yang dapat dengan mudah difahami tingkat atau rasio ekonomisnya. Berdasarkan diagram tersebut, terlihat bawasannya pada salah satu tahun anggaran, pelaksanaan atau penerapan realisasi anggaran mengalami perbedaan dengan tahun lainnya dengan nilai persentase yang lebih stabil.

Hasil penelitian dalam pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan konsep value for money yang diperoleh menunjukkan bahwa;

1. Tingkat Ekonomis

Tingkat ekonomis dari tahun 2014 – 2018 cenderung tidak stabil tetapi ekonomis karena menghasilkan rasio kurang dari 100%. Pemerintah telah berusaha dalam pencapaian kinerja yang ekonomis. Dengan rasio yang kurang dari 100% tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil dalam mengendalikan biaya-biaya yang dikeluarkan. Hal ini juga didukung dengan program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang telah terealisasi dengan baik. Sebagai contohnya dapat dilihat pada salah satu program kerja tahun 2018 adalah Program Pendidikan Sekolah Dasar yang mana angka ntuk setingkat SD/MI, target yang ditetapkan untuk nilai rata-rata Ujian Nasional tahun 2018 adalah sebesar 8,30 dengan realisasi sebesar 8,39 dengan angka ketercapaian 101,08%.

2. Tingkat Efisiensi

Apabila dilihat dari segi efisiensinya, maka kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sudah efisien karena tingkat efisiensinya memperlihatkan kurang dari 100%. Artinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo telah berhasil dalam meminimalkan sumber daya dan memaksimalkan hasil yang diterima sehingga tingkat persentase selalu dikatakan efisien. Hal ini juga didukung dengan program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang telah terealisasi dengan baik. Sebagai contohnya dapat dilihat pada salah satu program kerja tahun 2018 adalah Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang mana dibanding dengan capaian keluarga sehat tahun 2017 sebesar 14,01%, capaian keluarga sehat Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 18,57%.

3. Tingkat Efektivitas

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan efektif jika dilihat dari segi tingkat efektivitas, perhitungan rasio menunjukkan hasil lebih dari 100% yang mana bahwa dalam menentukan target penerimaan telah berhasil sesuai dengan tujuan dan sasarannya yang telah ditetapkan atau dianggarkan sebelumnya.

Saran

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo dengan meningkatkan sumber daya manusia baik aparatur daerah maupun masyarakatnya. Ditinjau dari hasil perhitungan tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas yang telah memuaskan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo perlu meninjau penentuan target-target yang akan datang agar ketiga rasio ini dapat tetap bertahan atau bahkan bisa lebih meningkat lagi. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian karena dalam penelitian ini hanya menganalisis satu daerah saja di provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Alayyal K. 2014. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep *Value For Money*. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya.
- Apriliansa, I. 2017. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang periode 2012-2016. *Skripsi*. Universitas Tidar : Magelang.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo. 2018. *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2014 – 2018*. Sidoarjo
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo. 2018. *Profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo*. Sidoarjo
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo. 2018. *Struktur Organisasi Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo*. Sidoarjo
- Basri, Y dan Mulyadi, S. 2003. *Keuangan Negara dan Kebijakan Utang Luar Negeri*. PT Grafindo Persada: Jakarta.
- Bastian, I. 2001. *Akuntansi Sektor di Indonesia*. BPFE: Yogyakarta.
- _____. 2006. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. BPFE, UGM. Yogyakarta.
- _____. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- _____. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Erlangga: Jakarta.
- Devas, N. 1995. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. UJ Press: Jakarta.
- Halim, A. 2001. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Hehamahue, H. 2014. Analisis APBD Kota Surabaya Suatu Kajian Kemandirian dan Efektifitas Keuangan Daerah. *Media Trend* 9 :54-68.
- Karlina, A. 2017. Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD Periode 2012-2015. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6 (3) : 912-924.
- LAN (Lembaga Administrasi Negara). *AKIP dan Pengukuran Kinerja*. Edisi Tahun 2008.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Revisi. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- _____. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Revisi. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFE. Jakarta.
- _____. 2011. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFE. Jakarta.
- Mardiasmo. 2000. *Akuntansi Keuangan Dasar*. BPFE: Yogyakarta.
- _____. 2002. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*, Erlangga. Yogyakarta.
- _____. 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.
- Moleong, L. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Pankey, Imanuel dan S Pinatik. 2015. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara periode 2011-2014. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Akuntansi* 3 (4) : 33-43.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. 3 April 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Jakarta.
- _____. Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 4 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Saragih, J. P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. PT Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286. Jakarta.

- _____ Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembagian Wewenang, Fungsi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Replublik Indonesia Nomor 4437. Jakarta.
- Wether, WB dan Davis, K. 1996. *Human Resources and Personal Management*. Megraw Hill Inc: New York.